

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL

Ade Irmansuryani
Irmaa7106@gmail.com
Endang Dwi Retnani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of Own-Source Revenue, General Allocation Funds on the Capital Expenditures of Regency and City of East Java Province. The research was quantitative. While, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was taken based on criteria given. In line with, there were 114 samples from 38 regencies/cities in East Java Province which taken from the Regional Asset Financial Management Agency (BPKAD) 2015-2017. Moreover, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 21. The research results concluded the Own-Source Revenue had positive effect on the Capital Expenditures. It meant, the amount of Own-Source Revenue which would be gained by local department had positive effect on its Capital Expenditure, as well as the General Allocation Funds, the Capital Expenditure would also increase. In addition, the local government would be able to build infrastructure and provide good service facilities for the community.

Keywords: Own-Source Revenue, General Allocation Funds, Capital Expenditures

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel data penelitian ini di peroleh dengan menggunakan metode *purposiv sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan metode *purposiv sampling* tersebut di dapatkan sebanyak 114 sampel dari 38 Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang datanya diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) secara lengkap mulai tahun 2015-2017 periode angkutansi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya hasil PAD yang diperoleh daerah maka akan berpengaruh baik Belanja Modal yang akan dipergunakan oleh suatu daerah, dan begitu pula dengan DAU, jika pemerintah pusat menstransfer DAU dengan jumlah besar maka akan meningkatkan belanja modal sehingga pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur serta memberikan fasilitas pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal

PENDAHULUAN

Setelah terjadinya krisis ekonomi yang ditimpa oleh Indonesia maka adanya perubahan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1996 yaitu perubahan politik dan administrasi. Reformasi tersebut merupakan perubahan bentuk pemerintah sentralisasi menjadi pemerintah yang terdesentralisasi dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 bahwa Pemerintah Daerah wajib mendapatkan suatu kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri dengan sedikit bantuan Pemerintah Pusat. Setelah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 maka digantinya dengan Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014 yaitu tentang Pemerintah Daerah yang memberlakukan pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan dengan cakupan luas untuk mengurus urusannya sendiri serta meminimalisir dengan sedikit ikut campur tangan Pemerintah Pusat.

Pemberian otonomi yang luas ke setiap daerah yaitu untuk mempercepat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang secara efisien, dan ada pula kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan kemampuannya menjadi pendukung sumber daya yang dimiliki tiap daerah dan dapat membangun suatu infrastruktur untuk memberikan kepuasan terhadap publik serta mengembangkan daerahnya sendiri secara otomatis akan terjadinya pembangunan nasional. Menurut Sukarna (2013:8) kekuasaan daerah otonomi sangat luas karena Pemerintah Daerah berwenang untuk mengurus urusan sendiri dalam kepentingan masyarakatnya yang terdiri dari bidang pendidikan, pertanian, kesejahteraan, perumahan, perekonomian dan lain-lainnya.

Mardiasmo (2002) mengungkapkan bahwa masih banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah yang terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya pendapatan asli daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam organisasi sektor publik yaitu terkait dengan pengalokasian anggaran. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan untuk memperoleh belanja daerah yang produktif. Pengeluaran Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai kegiatan operasi dalam pemerintahan. Untuk membiayai pengeluaran tersebut maka adanya sumber-sumber penerimaan daerah yang terdapat pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.

Menurut Maharani (2010) pendapatan asli daerah yaitu sumber yang dapat meningkatkan investasi belanja modal Pemerintah Daerah, maka kualitas dalam pelayanan publik semakin baik. Maharani, 2010 (dalam Kusnandar dan Siswantoro, 2012) menyatakan bahwa pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik dengan melakukan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap yakni peralatan, pembangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD yaitu untuk menambah aset tetap dan aset lainnya agar dapat memberikan manfaat yang lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan pada kebutuhan daerah yang akan sarana dan prasarana anggaran belanja modal baik untuk melancarkan pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Mardiasmo (2002) dalam meningkatkan kualitas publik, Pemerintah Daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Alokasi belanja modal merupakan peningkatan dalam bentuk aset tetap seperti tanah, infrastruktur bangunan dan peralatan lainnya. Infrastruktur sangatlah penting untuk meningkatkan produktivitas perekonomian daerah. Menurut Saragih (2003) pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti melakukan aktivitas pembangunan yang layak bagi masyarakat.

Dalam Keefer dan Khemani (2003) adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran yang menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat. Halim (2014) menyatakan bahwa belanja modal yaitu salah satu kelompok dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian dan penyediaan barang yang berwujud memiliki

daya guna satu tahun lebih yang dipergunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya untuk memberikan manfaat yang lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 24 Tahun 2005). Belanja Modal berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang yang pada umumnya untuk pembiayaan pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut, untuk mengatur segala kas milik daerah yang dapat dipergunakan dalam *public service* di daerah.

Setiap daerah pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing, hal tersebut dikarenakan dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah dengan daerah lainnya. Agar tidak terjadinya ketimpangan fiskal tersebut, maka Pemerintah Pusat harus mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing setiap daerah dengan mengalokasikan dana yang berasal dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan untuk setiap daerah dengan menekankan aspek-aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004). Adanya transfer dari pusat tersebut Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengalokasikan PAD untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya, namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi atau belanja daerah.

Hal ini tentunya akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum semakin tinggi, jika hasil yang diperoleh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tinggi, maka Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk memberikan pelayanan publik yang memadai untuk masyarakatnya, sehingga hal ini akan meningkatkan belanja modal serta dapat mewujudkan keinginan suatu daerah untuk memberikan kemanfaatan yang layak bagi masyarakat. Dan jika hasil Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum rendah, maka akan mempengaruhi belanja daerah sehingga pemerintah tidak dapat memberikan pelayanan publik yang memadai untuk masyarakat. Mardiasmo (2002) mengungkapkan bahwa peningkatan investasi Belanja Modal diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta dapat meningkatkan tingkat kontribusi terhadap pembangunan dan beberapa fasilitas sektor publik serta dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas yang mengenai adanya permasalahan-permasalahan tentang belanja daerah, maka diperlukan adanya penelitian untuk menguji kembali pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kab/Kota Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2015-2017. Oleh karena itu judul yang sesuai dengan penelitian ini adalah "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur".

TINJAUAN TEORITIS

Otonomi Daerah

Menurut Maimunah (2006) perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam setiap otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan kebijakan pemerintahan Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal satu Januari 2001, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi setiap aspek desentralisasi yang secara real.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri, pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Otonomi daerah pada hakikatnya berkenang dengan kelimpahan kewenangan untuk mengambil suatu keputusan, kebijakan, pengelolaan, serta publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Halim, 2004).

Tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakasa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Anggaran Daerah

Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Berdasarkan Mardiasmo (2004) anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Anggaran operasional yaitu Anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran yang termaksud anggaran operasional antara lain: Belanja Umum, Belanja Operasi, dan Belanja Pemeliharaan; (2) Anggaran modal yaitu Anggaran yang menunjukkan anggaran jangka panjang dan pemebelajaran atas aktiva tetap seperti: Gedung, Peralatan, Kendaraan, Perabotan dan sebagainya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran setingginya, guna untuk membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek pada suatu daerah dalam satu tahun periode anggaran serta menggambarkan perkiraan penerimaan tertentu dan sumber penerimaan daerah yang menutupi pengeluaran (Halim, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 8 tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan-peraturan daerah. Sedangkan Saragih (2003) mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari masing-masing setiap daerah yang dipungut berdasarkan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Sumber Pendapatan Asli Daerah dapat dikelompokkan menurut jenis pendapatan yaitu: (1) pajak daerah merupakan hasil dari kontribusi yang mewajibkan kepada setiap daerah terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan pada Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan daerah, pajak daerah yang meliputi antara lain: (a) Pajak Hotel; (b) Pajak Restoran; (c) Pajak Hiburan, (d) Pajak Reklame; (e) Pajak Penerangan Jalan; (f) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan; (g) Pajak Parkiran; (h) Pajak Air tanah; (i) Pajak Sarang burung Walet; (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (k) Pajak bea perolehan hak atas Tanah dan Bangunan; (2) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah

dapat dibagi dalam beberapa kelompok yaitu: (a) Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dalam kepentingan dan memberikan kemanfaatan umum; (b) Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula yang telah disediakan oleh sektor swasta; (c) Retribusi perizinan tertentu adalah perizinan dengan kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka atas desentralisasi, perizinan benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menganggulangi dampak negatif dan pemberian izin tersebut; (3) Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci dengan menurut objek pendapatan yang mencangkup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat; (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU disalurkan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan. Tata cara penyaluran DAU dan DAU tambahan di atur lebih lanjut oleh peraturan Menteri Keuangan. DAU tambahan yaitu kelebihan penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi yang ditetapkan dalam APBN perubahan dialokasikan sebagai DAU tambahan. DAU tambahan dialokasikan kepada daerah berdasarkan formula DAU atas dasar celah fiskal.

Halim (2009) menyatakan bahwa alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang realtif kecil, sedangkan daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar, dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan Belanja Pegawai.

Jumlah DAU setiap tahun ditentukan oleh keputusan Presiden. Setiap provinsi/abupaten/kota berhak menerima DAU dengan besaran yang tidak sama. Daerah dimungkinkan mendapatkan DAU lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan DAU tahun sebelumnya. Bahkan di beberapa daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang sangat besar dimungkinkan untuk tidak mendapat DAU atau DAU = 0.

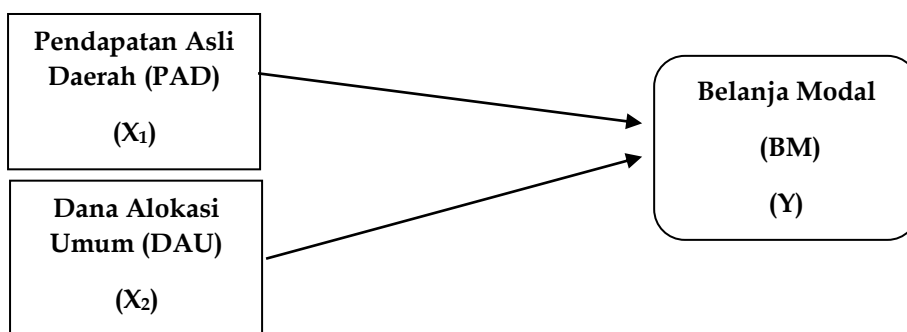
Belanja Modal

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah atau selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Hasil yang dimiliki dari belanja modal adalah aset tetap yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tujuan atas pembelian aset tersebut ialah salah satu untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara optimal. Aktivitas Belanja Modal bagi setiap daerah karena apabila belanja modalnya tinggi pada suatu daerah maka akan meningkatkan perekonomian pada daerah tersebut. Menurut Keefer dan Khemani (2003) didalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran mengklasifikasi Belanja Modal dalam beberapa bentuk yaitu: (1) Belanja Modal Tanah yaitu seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai; (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan; (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan; (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. (5) Belanja Modal Lainnya Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan, dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain).

Model Penelitian



Gambar 1
Model penelitian

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

PAD sangatlah berperan penting dalam mengembangkan daerah sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik karena Semakin tingginya PAD yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin tinggi pula Belanja Modal sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah, begitu pula sebaliknya apabila PAD yang diperoleh suatu daerah tinggi, maka daerah tersebut tidak akan bergantung pada

dana dari Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah dikatakan berhasil melakukan otonomi daerah sebagai bentuk dari desentralisasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Priambudi (2017) bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal yang mengungkapkan semakin besarnya PAD yang diperoleh daerah maka penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyediaan fasilitas publik. Yang penelitiannya tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah di gunakan untuk membiayai bangunan daerah, karena kondisi sumber daya alam yang berbeda dengan daerah lain, yang menyebabkan bahwa daerah yang mempunyai sumber daya yang tinggi akan lebih menonjol dibandingkan dengan daerah yang mempunyai sumber daya yang rendah dan daerah tersebut akan tertinggal. Oleh karena itu diberikannya Dana Alokasi Umum agar tidak adanya ketimpangan fiskal antar daerah tersebut. DAU yang semakin besar diberikan oleh pemerintah pusat maka Belanja Modal yang dihasilkan akan besar pula yang di anggarkan. Dana Alokasi Umum akan diserahkan ke daerah sesuai dengan prioritas yang idealnya dialokasikan untuk belanja yang berimplikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014) menemukan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dalam penelitian tersebut mengemukakan bahwa alokasi penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas daerah yang idealnya dialokasikan untuk belanja yang berimplikasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif karena penelitian yang dilakukan berupa data dalam bentuk angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik dan hasilnya akan dipaparkan dengan secara sistematis.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 9 kota dan 29 kabupaten, total populasi tersebut adalah 38 dari seluruh provinsi jawa timur. Obyek yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2015-2017.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik Purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik-teknik dalam menentukan sampel yang menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur yang telah melaporkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada BPKAD selama 3 tahun dimulai pada tahun 2015-2017.

Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Kab/Kota di Jawa Timur; (2) Kabupaten/Kota yang telah memasukkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara lengkap selama 3 Tahun dimulai pada Tahun 2015-2017.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung akan tetapi melalui media perantara. Data yang dapat digunakan dalam penelitian ini berupa data Laporan Realisasi Anggaran APBD periode tahun 2015-2017. Data tersebut diperoleh dari instansi pemerintah Kota Surabaya yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Variabel Dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Penelitian

Sugiyono (2004) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan. Terdapat dua jenis Variabel yaitu : Variabel Dependen dan Variabel Independen.

Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2004) operasional variabel adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep dan bagaimana harus diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Dalam penelitian ini variabel independennya adalah pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sedangkan untuk variabel dependennya adalah belanja modal. Secara lebih rinci operasional variabel penelitian dapat diukur sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) di ukur dari: Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; (2) Dana Alokasi Umum di ukur dari: Alokasi dasar + celah fiskal; (3) Belanja Modal (BM) di ukur dari: Belanja Modal tanah + Belanja Modal Peralatan dan Mesin + Belanja Modal Gedung dan Bangunan + Belanja Modal Jalan + Irigasi dan Jaringan + Belanja Modal Fisik Lainnya.

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Untuk menyederhanakan satuan dalam jumlah besar dengan cara yang logis. Data yang banyak direduksi dan diringkas sehingga lebih sederhana dan tersusun rapi. Tujuan statistik deskriptif yaitu untuk melihat profil data penelitian dengan hubungan antara variabel yang digunakan, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana alokasi Umum dan Belanja Modal.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang pada umumnya hubungan antara pendapatan asli daerah, dana alokasi umum terhadap belanja modal. Untuk menguji persamaan hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini sebagai berikut:

$$BM_t = \alpha + \beta_1 PD_{t-1} + \beta_2 DU_{t-1} + e$$

Keterangan :

α : konstanta

$\beta_1 \beta_2$: nilai koefisien

PD : Pendapatan asli daerah

DU : dana alokasi umum

BM : belanja modal

e : *error term*

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu : Uji normalitas, Uji autokorelasi, Uji heteroskedastisitas, dan Uji multikolinearitas. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada dan kemudian akan dilakukan perbaikan pada uji tersebut dan setelah memenuhi persyaratan apakah data tersebut dikatakan layak atau tidak.

Uji Normalitas

Adalah sebuah uji yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel-variabel apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak.

Uji Autokorelasi

Adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Ghozali (2006) menyatakan bahwa untuk mendeteksi ada dan tidak adanya autokorelasi bisa menggunakan uji *Durbin-Watson*. Secara umum dapat dilihat sebagai berikut: (a) Angka D-W dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif; (b) Angka D-W diantara -2 sampai $+2$ tidak terdapat autokorelasi; (c) Angka D-W diatas $+2$ berarti terdapat autokorelasi negatif

Uji Multikolinearitas

Adalah untuk melihat ada atau tidak adanya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Untuk mengambil keputusan dalam menguji multikolinearitas yaitu dengan melihat *Tolerance* (TOL) *variance inflation factor* (VIF), anatara lain sebagai berikut: (a) Jika nilai TOL lebih besar dari $0,10$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas; (b) Jika nilai TOL lebih kecil dari $0,10$ maka dapat diartikan bahwa terjadinya multikolinearitas dalam; (c) Jika nilai VIF $< 10,00$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas dalam model regresi; (d) Jika nilai VIF $> 10,00$ maka dapat diartikan terjadinya multikolinearitas dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode *Scatter Plot* dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan ESID (nilai residualnya). Uji ini untuk melihat ada atau tidak adanya heteroskedastisitas dengan cara melihat gambar plot antara nilai prediksi suatu variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (S-RESID). Jika ada titik-titik yang menyebar pada grafik tersebut dengan secara acak dan tidak membentuk pola di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka dikatakan tidak terjadinya heteroskedastisitas, (Ghozali, 2006).

Uji Kelayakan Model

Untuk menilai model yang telah terbentuk. Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung. Dalam menentukan nilai F tabel, tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5% . Jika F hitung $>$ dari F table, maka model signifikan selama komlo signifikansi $(\%) < \alpha$. Jika F hitung $<$ F tabel, maka model tidak signifikan. Dengan ini dapat ditandai dengan nilai kolom signifikansi $(\%)$ akan lebih besar dari α .

Uji Hipotesis/Uji t

Untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dengan variabel dependen. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka t hitung tersebut signifikan yang artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Nilai t tabel ditentukan dengan tingkat signifikansi $(\alpha) 5\%$ dengan derajat kebebasan $df = n-k$, dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan antara

lain: (a) Apabila signifikan uji $t < 0,05$ maka H_0 ditolak; (b) Apabila signifikansi uji $t > 0,05$ maka H_0 diterima.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Populasi dan Sampel

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Teknik dalam pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan adalah Kab/Kota Provinsi Jawa Timur yang telah melaporkan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada BPKAD selama 3 tahun. sampel yang diperoleh data (n) sebanyak 114, dari 38 Kab/Kota Jawa Timur dikalikan dengan 3 tahun (2015-2017) periode pengamatan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang berupa data dari Laporan Realisasi Anggaran APBD Kabupaten/kota di Jawa Timur yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum dan minimum. Variabel yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal.

Berikut tabel 2 akan menunjukkan hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini:

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
(Dalam Jutaan Rupiah)
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	114	104.233	5.145.149	4.2260	7.00268
DAU	114	15.738	1.709.892	9.3588	3.19941
BM	114	74.291	2.517.618	4.5767	3.19359
Valid N (listwise)	114				

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Dari hasil tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah nilai observasi (N) dalam penelitian ini adalah sebesar 114. Untuk melihat nilai minimum, maximum, mean dan standar deviasi dapat dilihat sebagai berikut: (1) PAD yang memiliki nilai terkecil dengan jumlah sebesar 104.233 yang diperoleh dari Kota Batu pada tahun 2015, dan PAD yang terbesar dengan jumlah adalah 5.145.149 yang dihasilkan oleh Kota Surabaya pada tahun 2017. Nilai rata-rata atau mean yang diperoleh Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017 sebesar 4.2260 dan hasil standar deviasi sebesar 7.00268; (2) DAU yang memiliki nilai terkecil dengan jumlah sebesar 15.738 yang diperoleh dari Kabupaten Magetan pada tahun 2016, dan DAU yang memiliki nilai terbesar dengan jumlah sebesar 1.709.892 yang dihasilkan oleh Kabupaten Jember pada tahun 2016. Nilai rata-ratanya adalah 9.3588 dan hasil standar deviasinya adalah 3.19359; (3) BM menghasilkan nilai yang terkecil adalah sebesar 74.291 diperoleh Kota Probolinggo pada tahun 2015, dan nilai terbesar dihasilkan oleh Kota Surabaya dengan nilai sebesar 2.517618 pada tahun 2017. Nilai rata-ratanya sebesar 4.5767 dan untuk standar deviasi memperoleh nilai sebesar 3.19359.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang untuk mengetahui bagaimana arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen yang pada umumnya hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Tabel 2 yang akan menunjukkan bagaimana hasil dari pengujian regresi linier berganda.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	92382.698	39906.404		2.315	.022
1 PAD	.374	.019	.820	19.588	.000
DAU	.221	.042	.222	5.295	.000

a. Dependent Variable: BM
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel 2 di atas akan menunjukkan nilai hasil dari perumusan sebagai berikut, yaitu dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 5% :

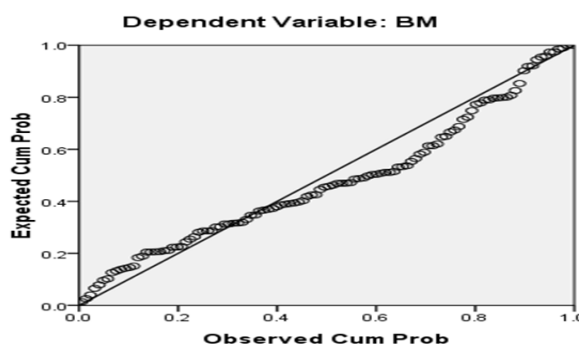
$$BM = 92.382.698 + 0,374 PAD + 0,221 DAU$$

Berdasarkan hasil pada tabel 3 di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: (a) Nilai koefisien pada variabel PAD yaitu sebesar 0,374. Dari nilai koefisien ini bersifat positif, karena nilai signifikan yang diperoleh pada variabel PAD adalah 0,000. Maka dapat diartikan bahwa ada hubungan yang searah antara variabel PAD dengan BM Kabupaten/kota di Jawa Timur; (b) Nilai koefisien pada variabel dana alokasi umum yaitu sebesar 0,221. Dapat dilihat bahwa nilai koefisien ini bersifat positif, karena nilai signifikan yang dihasilkan oleh DAU adalah 0,000. Maka dapat diartikan bahwa ada hubungan yang searah antara variabel DAU dengan BM Kabupaten/kota di Jawa Timur.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013) untuk menguji normalitas residual data variabel independen dan variabel dependen, maka penelitian ini akan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorof-Smirnov*. Pendekatan grafik dapat diketahui dengan cara yaitu : (a) Melihat data atau titik-titik yang tersebar sesuai dengan arah garis diagonal atau mendekati arah garis diagonal maka data tersebut akan dikatakan normal; (b) Apabila data atau titik-titik tidak mengikuti arah garis diagonal atau tersebar jauh dari arah garis diagonal maka data tersebut tidak dikatakan normal. Berikut ini dapat dilihat bagaimana hasil grafik *Normal Probability Plot* pada gambar 2.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Gambar 2
Uji Normalitas

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa data atau titik-titik yang menyebar sesuai dengan arah garis diagonal atau mendekati garis diagonal antara 0 (nol) dengan sumbu Y dan

sumbu X. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini dikatakan normal dan telah memenuhi syarat normalitas.

Pendekatan *Kolmogorov-Smirnov Test* dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut dikatakan normal atau tidak normal. Data dikatakan normal apabila nilai signifikan uji *Kolmogorov-Smirnov Test* lebih besar dari $> 0,05$ maka data tersebut akan dikatakan normal. Dalam hasil Uji Normalitas dengan pendekatan *Kolmogorov-Smirnov Test* dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.35831651E5
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.130
	Negative	-.072
Kolmogorov-Smirnov Z		1.514
Asymp. Sig. (2-tailed)		.073

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji pada tabel 3 *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diatas, dapat dikatakan bahwa nilai signifikansinya adalah 0,073 yang berarti lebih besar dari $> 0,05$ dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi penelitian ini akan menggunakan uji statistik Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan: (a) Apabila angka D-W dibawah -2 berarti terdapat autokorelasi positif; (b) Apabila angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi sedangkan; (c) Apabila angka D-W diatas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.905 ^a	.819	.816	1.37050E5	1.718

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Seperti yang diketahui pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai dari angka *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1,718 yang artinya angka tersebut berada diantara -2 sampai +2. Jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini sehingga data layak digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinearitas

Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi (hubungan kuat) antar variabel bebas atau variabel independen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara untuk mengetahui hasil dengan melihat nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan ketentuan-ketentuan, Jika nilai TOL lebih besar dari $> 0,10$ dan nilai VIF kurang dari < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Berikut hasil tabel uji multikolonieritas dapat dilihat nilai TOL dan lawannya VIF dibawah ini:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	92382.698	39906.404		2.315	.022		
PAD	.374	.019	.820	19.588	.000	.929	1.076
DAU	.221	.042	.222	5.295	.000	.929	1.076

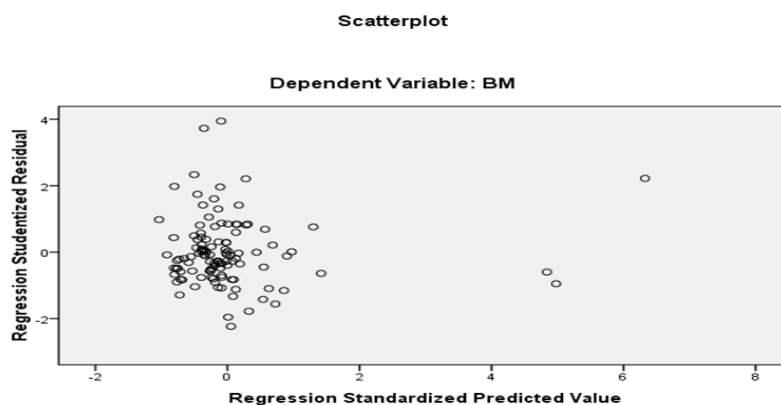
a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel 5 diatas menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai TOL dari seluruh variabel tidak ada yang memiliki nilai TOL kurang dari 0,10 melainkan lebih besar dari 0,10 yaitu untuk Pendapatan Asli Daerah $0,929 > 0,10$ dan Dana Alokasi Umum $0,929 > 0,10$. Sedangkan perhitungan nilai VIF seluruh variabel kurang dari 10 yaitu untuk Pendapatan Asli Daerah $1,076 < 10$ dan Dana Alokasi Umum $1,076 < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam regresi dantelah memenuhi kriteria yang terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dapat dilihat dengan gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan nilai residualnya (SRESID), (Ghozali 2006). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar dan menyempit) dan data menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 (nol) maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.



Sumber: Data Sekunder Diolah, 2019

Gambar 3
Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar 3 menunjukkan bahwa ada titik-titik yang menyebar secara acak diatas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat pola tertentu yang teratur. Sehingga pada gambar 3 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya Heterokedastisitas dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model

Untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan ketentuan yaitu membandingkan antara nilai signifikan F dengan nilai signifikansi yang digunakan yaitu apabila nilai signifikansi < 0,05 maka model dianggap tidak layak dilakukan untuk penelitian.

Tabel 6
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

ANOVA ^b						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9.440E12	2	4.720E12	251.295	.000 ^a
	Residual	2.085E12	111	1.878E10		
	Total	1.152E13	113			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Pada tabel 6 menunjukkan angka yang diperoleh dari F hitung sebesar 251,295 dengan angka signifikansi sebesar 0,000 hali ini berarti signifikansi lebih kecil dari 0,005. Maka hasil uji f ini dapat disimpulkan bahwa model penelitian layak digunakan dalam penelitian.

Selanjutnya uji koefisien determinasi dengan tujuan untuk menguji tingkat keterikatan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal. Ketentuan koefisien determinasi ini adalah jika nilai *adjusted-R2* semakin mendekati 1, maka menunjukkan pengaruh yang semakin kuat sedangkan jika nilai *adjusted-R2* mendekati 0, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dikatakan lemah.

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R₂)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.905 ^a	.819	.816	1.37050E5

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BM

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Seperti yang telah diketahui pada tabel 7 di atas diperolehnya nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,816 (81,6%). Hal ini menunjukkan bahwa adanya keterikatan atau pengaruh antara variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap variabel belanja modal di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Sedangkan sisanya sebesar 18,4 % merupakan faktor lainnya yang tidak ada di dalam penelitian yang juga berpengaruh terhadap belanja modal.

Uji Statistik t

Untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Adapun criteria dalam pengujian

secara parsial dengan tingkat signifikan $\alpha = 0,05$. Apabila signifikansi uji $t < 0,05$ maka H_0 ditolak. Sedangkan apabila signifikansi uji $t > 0,005$ maka H_1 diterima.

Tabel 8
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	92382.698	39906.404		2.315	.022
PAD	.374	.019	.820	19.588	.000
DAU	.221	.042	.222	5.295	.000

a. Dependent Variable: BM

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel 8 diatas dapat dilihat: (1) PAD (X1) terhadap Belanja Modal (Y) menunjukkan nilai t hitung sebesar 19,588 dengan angka signifikan 0,000. Dapat disimpulkan bahwa PAD signifikan terhadap BM karena angka signifikannya dibawah angka 0,05. Untuk angka koefisien PAD sebesar 0,374. Hal ini dapat dijelaskan bahwa PAD positif terhadap Belanja Modal. Angka tersebut menunjukkan H_1 diterima; (2) DAU (X2) terhadap Belanja Modal (Y) menunjukkan nilai t hitung sebesar 5,295 dengan angka signifikan 0,000 yang menjelaskan DAU signifikan pada Belanja Modal karena angka signifikan di bawah angka 0,05. Angka koefisien DAU sebesar 0,221. Hal ini dapat dijelaskan bahwa DAU positif terhadap Belanja Modal. Angka tersebut menunjukkan H_2 di terima.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 8 di atas bahwa, hasil uji t menunjukkan nilai t hitung pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 19,588 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka hasil dari perhitungan uji t tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Karena hasil PAD yang besar dapat membantu untuk membiayai kebutuhan belanja daerahnya. Pendapatan Asli Daerah yang Meningkatkan akan memberikan manfaat untuk meningkatkan penyediaan fasilitas publik melalui pembangunan infrastruktur. Dimana Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah dan hasil dari pendapatan tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan organisasi, pembangunan setiap daerah melalui belanja modal. Dengan adanya pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana dari pemerintah akan memberikan dampak yang baik dalam pertumbuhan ekonomi, mendorong masyarakat dalam kegiatan perekonomian agar kegiatan perekonomian akan tetap berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu pemerintah daerah diharapkan dapat menggali sumber pendapatan daerahnya secara maksimal, karena PAD berperan penting dalam pembangunan serta kemajuan untuk daerahnya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priambudi (2017) dengan hasil pengujiannya yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (BM) yang penelitiannya tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa tahun 2013.

Jika PAD Menurun maka belanja modal tidak akan terpenuhi, sehingga daerah tersebut tidak mampu memberikan fasilitas yang bagus untuk masyarakat dan dapat

dikatakan bahwa daerah tersebut akan bergantung terus dengan pemerintah pusat dan akan tertinggal jauh dengan daerah yang sudah memiliki potensi yang besar. Sumber penghasilan PAD dapat berasal dari Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 8 dapat dilihat bahwa hasil uji t menunjukkan nilai t hitung Dana Alokasi Umum sebesar 5,295 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/kota di Jawa Timur.

Karena DAU yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka akan semakin meningkat pulan Belanja Modal yang di anggarkan. Diperolehnya DAU yaitu dapat membantu untuk membiayai pembangunan daerah agar pembangunan tersebut lebih merata dan daerah tersebut tidak akan tertinggal dengan daerah yang memiliki sumber yang tinggi sehingga daerah tersebut dikatakan berhasil dalam pelaksanaan desentralisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sugiardi dan Supadmi (2014) yang menemukan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) pada umumnya mempunyai keterkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah dengan Keterkaitan pembangunan infrastruktur daerah maka dapat dikatakan bahwa bantuan berupa DAU yang dikirimkan dari nasional atau pemerintah pusat dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah (PEMDA) untuk mendanai kegiatan atau program pemerintah daerah melalui belanja daerah terutamanya belanja modal. Novianto dan Hanafiah (2015) menyatakan bahwa DAU yang semakin besar diberikan oleh pemerintah pusat maka belanja modal yang dihasilkan akan besar pula yang di anggarkan. Dana alokasi umum akan diserahkan ke daerah sesuai dengan prioritas yang idealnya dialokasikan untuk belanja yang berimplikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat. DAU berperan penting dalam belanja modal yaitu untuk menambah aset tetap daerah. Dengan tujuan memberikannya dana alokasi umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah karena untuk pemerataan keuangan antar daerah, agar daerah yang memiliki potensi sumber yang rendah tidak tertinggal jauh dengan daerah yang memiliki potensi sumber yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah pusat sangat berharap agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana alokasi umum secara tepat dan sesuai sasaran demi terciptanya kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan terwujudnya pelaksanaan desentralisasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini yang mengenai tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (BM) di Provinsi Jawa Timur dengan periode akuntansi tahun 2015-2016. Tujuannya yaitu untuk mengetahui atau menganalisis apakah PAD dan DAU berpengaruh terhadap BM. Pengambilan data berasal dari Laporan Realisasi Anggaran tahunan BPKAD. Maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota Jawa Timur, hal ini dapat dikemukakan bahwa dari setiap terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka akan berpengaruh baik untuk meningkatkan belanja modal. Dengan meningkatnya sumber pendapatan daerah maka daerah tersebut akan jauh lebih menjadi mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat lagi dan daerah tersebut telah berhasil melakukan suatu otonomi daerah sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku; (2) Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kabupaten/kota Jawa Timur, hal ini dapat

dikemukakan bahwa meningkatnya DAU maka akan terjadi peningkatan pada Belanja Modal yang dianggarkan. Harapannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai serata untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat, menyeimbangkan keuangan antar daerah agar tidak terjadinya ketimpangan fiskal.

Saran

(1) Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur agar lebih menyeimbangkan keuangannya, memanfaatkan sumber daya yang ada serta mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber pendapatan daerah lebih banyak, agar lebih berkembang dan tidak akan tertinggal dengan daerah lainnya sehingga tidak bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga harus lebih memerhatikan dan sering memantau pembangunan di desa-desa terpencil yang cukup jauh dari perkotaan, agar pembangunan akan lebih merata sampai ke pelosok desa; (2) Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar lebih memperbanyak atau memperluas objek penelitian, dan menambahkan variabel independen dalam penelitian selain PAD dan DAU agar hasil penelitiannya lebih baik lagi; (3) Penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih memperpanjang tahun periode sehingga hasil yang diperoleh lebih kompleks dan dapat digunakan untuk pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Keterbatasan: (1) Data yang di ambil untuk penelitian ini yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD); (2) Keterbatasan periode penelitian hanya menggunakan 3 tahun yaitu mulai tahun 2015-2017; (3) Dalam penelitian ini masih menggunakan dua variabel independen yaitu PAD dan DAU sehingga hasil yang diperoleh masih sangat sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Universitas Diponegoro. Semarang.
- _____. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2009. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Keefer, P. dan S. Khemani. 2003. *Democracy, Public Expenditures, and the Poor*. *World Bank Policy Research Working Paper*.
- Kusnandar dan Siswanto. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Maharani, M. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Maimunah, M. 2006. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umu, Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kab/Kota di Pulau Sumatera. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- _____. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Novianto, R. dan R. Hanafiah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*: 1-22.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 *Tentang Klasifikasi Anggaran*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Priambudi, W. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Ilmu Ekonomi Akuntansi* VI(01).
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia. Indonesia.
- Sugiyono. 2004. *Statistika Untuk Penelitian*. Edisi Keenam. CV Alfabeta. Bandung.
- Sugiarti dan Supadmi. 2014. Pengaruh PAD, DAU dan SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Sukarna, W. 2013. *Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik*. P3DI Setjen DPR Republik Indonesia. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.